



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 166 TAHUN 2022 TENTANG TIM
PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 167 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA DAN *MONITORING*
PERCEPATAN KEGIATAN PRIORITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah tercapainya pemenuhan penugasan Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dan Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 166 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 166 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 166 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 167 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN KEGIATAN PRIORITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 166 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 166 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas Tim Pelaksana dan *Monitoring* hingga tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Miftah Irfaniah

